

DINAMIKA PENANGGAPAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Fajar Laksono Suroso

WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR

SKLN

PARPOL

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD

MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL TENTANG PEMILIHAN UMUM

PHPU

PEMAKZULAN

WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN.

DINAMIKA PENGATURAN UU PILKADA REZIM PEMILU ATAU PEMDA?

**UU NOMOR 22
TAHUN 1999**
TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH

**UU NOMOR 32 TAHUN
2004**
TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH

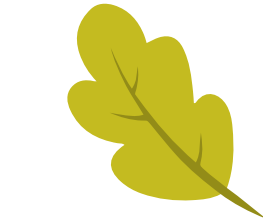
**UU NOMOR 22 TAHUN
2014**
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA

UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UU





PUTUSAN NOMOR 072- 073 /PUU-II/2004
PEMBENTUK UU DAPAT MENENTUKAN
PILKADA ITU PEMILU ATAU BUKAN
PEMILU



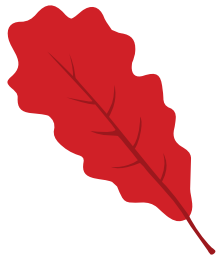
UU NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM



UU NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANGUNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH.



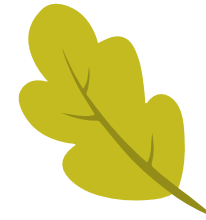
PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013:
SENGKETA PILKADA BUKAN
WEWENANG MK



UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UU



UU NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN UU
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UU



UU NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UU NOMOR PENETAPAN
PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UU



PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022
PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALI
KOTA MERUPAKAN WEWENANG MK
UNTUK MEMUTUS

PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022

PILKADA = REZIM PEMILU = WEWENANG MK

PHPU

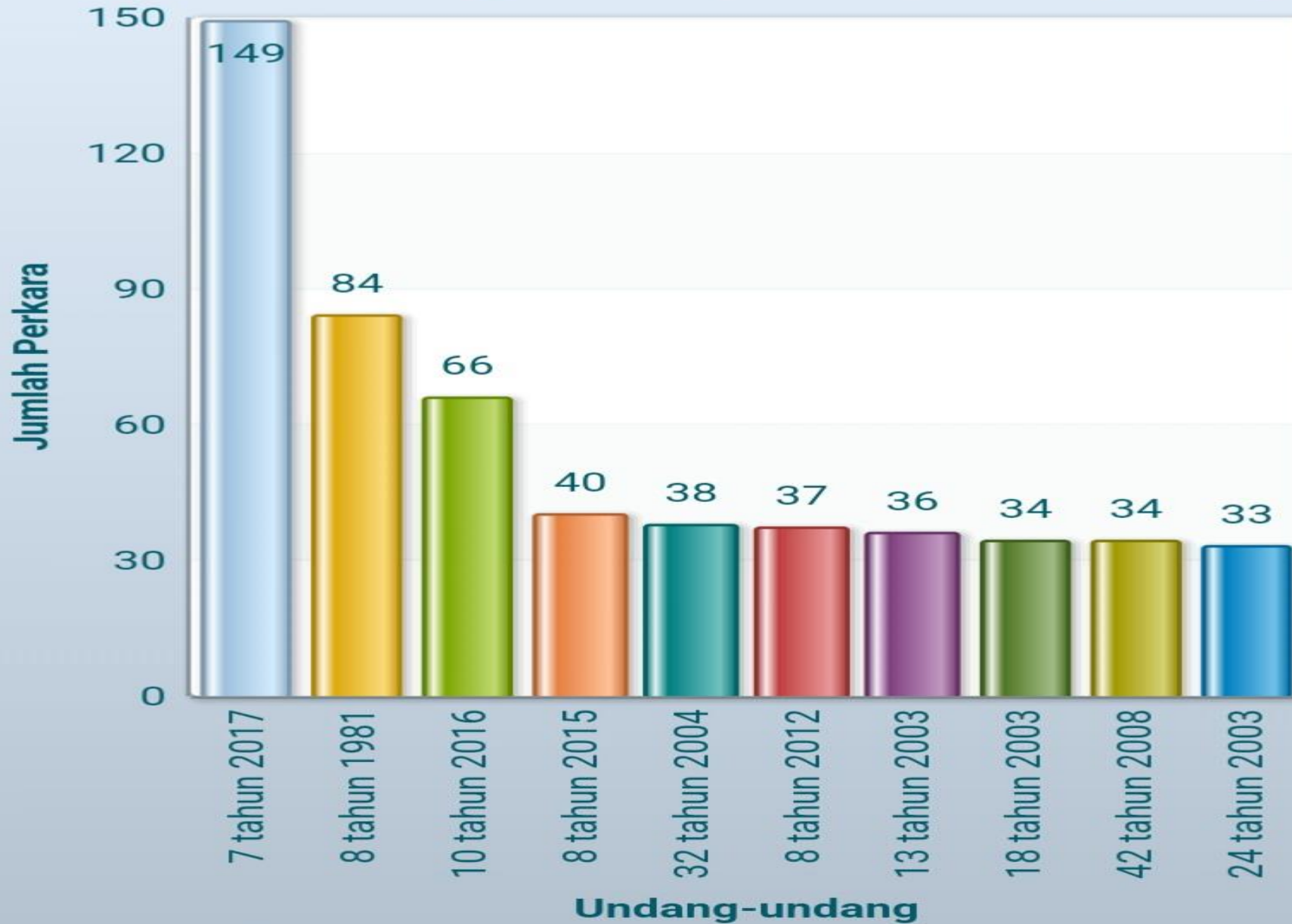
MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL
TENTANG PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN UMUM

- PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- **GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA**

10 Undang-undang Paling Sering Di Uji



DINAMIKA
PUTUSAN
MK
(PUU DAN
PHP KADA)

DINAMIKA PENANGANAN PERKARA PHP KADA

Chart Putusan PILKADA Berdasarkan Amar (1136)

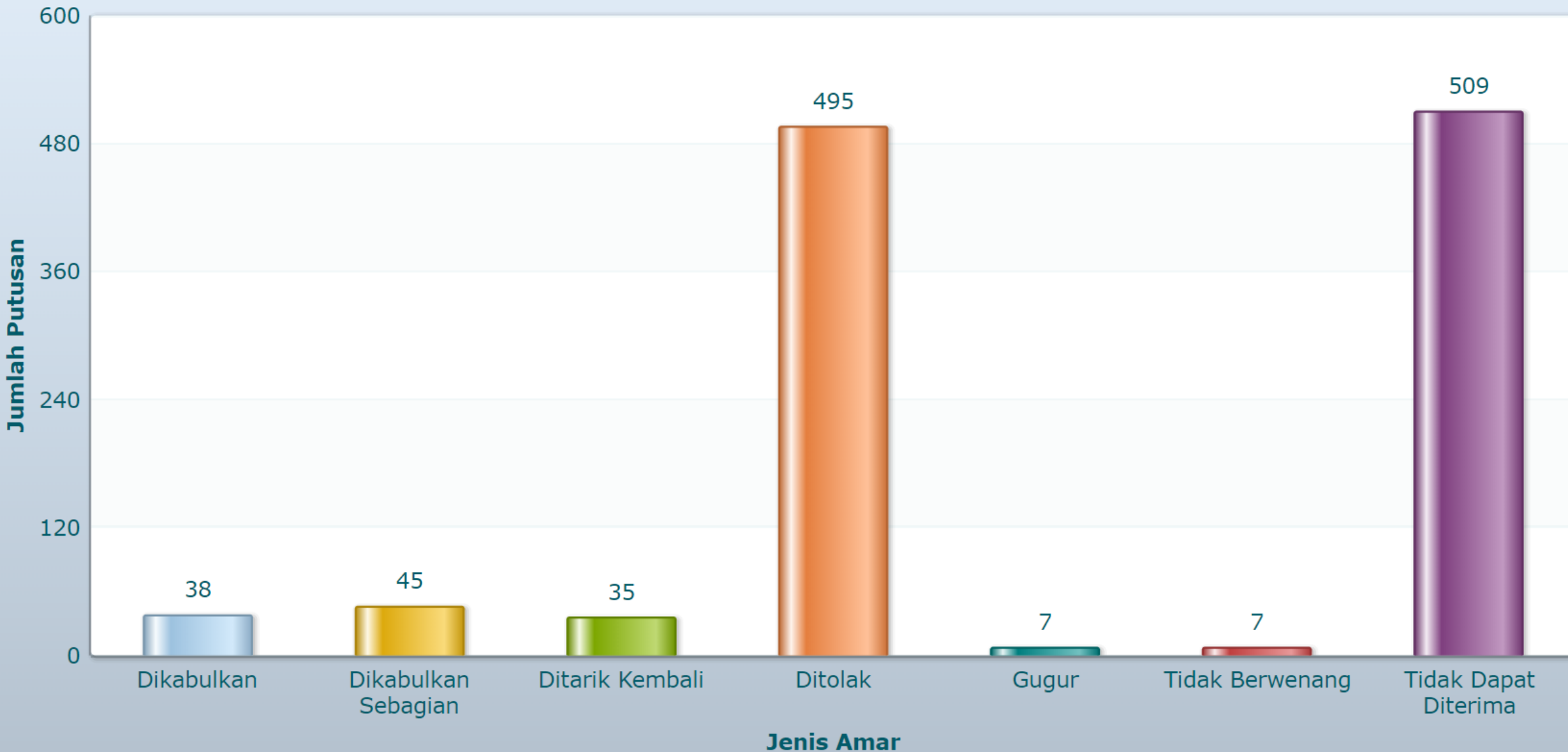


Chart Jumlah Putusan Perkara Pilkada Per Tahun



DALIL PERMOHONAN YANG SERING DIMUNCULKAN



DINAMIKA PASAL 158 UU 10/2016

MENUNDA PEMBERLAKUAN KETENTUAN “AMBANG BATAS”

1. PUTUSAN MK NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018 (PARE-PARE)
2. PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (NABIRE)
3. PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (TELUK BINTUNI)
4. PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 22 MARET 2021 (BOVEN DIGOEL)
5. PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (SABU RAI JUA), DAN
6. PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (YALIMO)

DIPERTIMBANGKAN BERSAMA-SAMA DENGAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. PUTUSAN MK NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (PESISIR BARAT)
2. PUTUSAN MK NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (KAB. BANDUNG)
3. PUTUSAN MK NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (NIAS SELATAN)
4. PUTUSAN MK NOMOR 100/PHP.BUP/XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (KAB. SAMOSIR)
5. PUTUSAN MK NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19
MARET 2021 (YALIMO)
6. PUTUSAN MK NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19
MARET 2021 (KAB. TASIKMALAYA)
7. PUTUSAN MK NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021 TANGGAL 22
MARET 2021 (KOTA BANJARMASIN)



TERIMA KASIH